

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

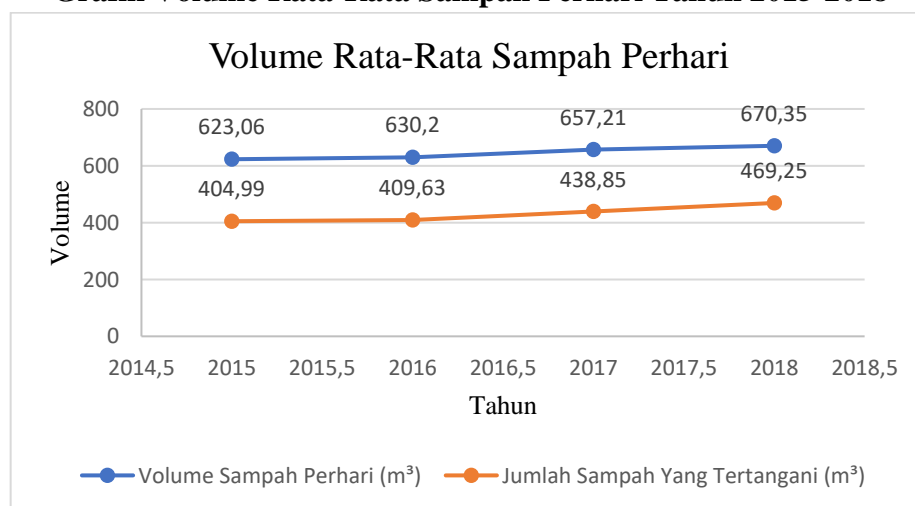
### **1.1 Latar Belakang**

Masalah sampah di Indonesia telah menjadi isu yang harus diperhatikan khususnya pada daerah perkotaan. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki kepadatan penduduk yang banyak di mana pada tahun 2017 penduduk provinsi Jawa Tengah mencapai 34.000 jiwa dengan persentase penduduk kota sebesar 48,4% (BPS Jateng, 2018). Banyaknya penduduk suatu wilayah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tumpukan sampah meningkat. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat maka tingkat konsumsi dan aktivitas lain yang menghasilkan sampah pun akan meningkat. Permasalahan sampah jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan penyakit bagi masyarakat setempat. Mendasari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 5 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka pemerintah wajib untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dan juga memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki populasi penduduk yang banyak di mana produksi sampah pada 2017 mencapai 1.100 m<sup>3</sup> per hari (BPS Jateng, 2018). Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) merupakan komponen yang sangat penting dalam penanganan masalah sampah. Namun di wilayah Kabupaten Banyumas, TPA justru menjadi permasalahan utama yang menyebabkan penumpukan sampah terus bertambah. Permasalahan sampah tidak hanya disebabkan oleh kurangnya lahan TPA saja, tetapi juga kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah juga masih rendah seperti tidak menggunakan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan banyak dari masyarakat yang lebih memilih membuang sampah di tepi jalan, sungai, atau membakar sampah. Selain itu, penambahan volume sampah harian juga menjadi salah satu masalah jika tidak dapat ditangani dengan baik. Berikut data peningkatan volume rata-rata sampah harian tiap tahunnya di wilayah perkotaan Purwokerto dapat dilihat secara detail pada grafik berikut.

**Gambar 1.1**  
**Grafik Volume Rata-Rata Sampah Perhari Tahun 2015-2018**



Sumber: Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2023

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa volume rata-rata sampah di perkotaan Purwokerto pada tahun 2015, jumlah volume rata-rata harian sampah mencapai sekitar 623,06 m<sup>3</sup> kemudian mengalami kenaikan sekitar 15% di tahun 2016 dengan jumlah sekitar 630,2 m<sup>3</sup>. Di tahun 2017, volume rata-rata sampah mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni sekitar 57% dengan jumlah sebesar 657,21 m<sup>3</sup>. Pada tahun 2018 kenaikan kembali terjadi meskipun tidak sebanyak tahun sebelumnya yakni sekitar 28% dengan jumlah sebesar 670,35 m<sup>3</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan rata-rata volume sampah harian di Kota Purwokerto terjadi setiap tahun meskipun kenaikan terbesar hanya terjadi di tahun 2017 dalam rentang tahun 2015-2018.

Selanjutnya, data sampah yang tertangani pada tahun 2015 berjumlah sekitar 404,99 m<sup>3</sup> atau sebesar 65% dan sisanya 35% atau 220,57 m<sup>3</sup> tidak dapat tertangani. Kemudian tahun 2016, jumlah volume sampah yang dapat tertangani sebesar 409,65 m<sup>3</sup> atau sekitar 65% dan sisanya 35% atau 218,36 m<sup>3</sup> tidak dapat tertangani. Jika dilihat dari tahun 2015 sampai 2016, penanganan sampah mengalami *stagnant* atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Lalu, tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 2%, dengan jumlah volume sampah yang dapat tertangani yakni sebesar 438,35 m<sup>3</sup> atau sekitar 67% dan sisanya 33% atau sekitar 218,36 m<sup>3</sup> yang tidak dapat tertangani. Tahun 2018, terjadi kenaikan kembali dengan jumlah sampah yang tertangani sekitar 70% atau 469,25 m<sup>3</sup> dan sisanya 30% atau 201,10 m<sup>3</sup> tidak bisa tertangani. Meskipun dalam penanganan volume sampah harian mengalami kenaikan tiap tahunnya, namun kenaikan yang dialami dapat

dikatakan sangat sedikit dan penanganan sampah belum mencapai keefektifan yang diinginkan. Bahkan pada tahun 2016, penanganan sampah oleh Pemkab Banyumas mengalami *stagnant* seperti pada tahun sebelumnya.

Berkembangnya revolusi industri yang sekarang berada pada level 4.0 menyebabkan semua aspek mengalami perubahan yang sebelumnya sangat konservatif menjadi serba digital. Perubahan tersebut tentunya terjadi di lingkup pemerintahan yang mana pemerintah terus melakukan inovasi pelayanan melalui *e-service* untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Adanya perubahan menuju digitalisasi ternyata mampu memberikan perubahan dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Dinas Lingkungan Hidup menciptakan inovasi pengelolaan sampah berbasis online yang dapat diakses oleh masyarakat perkotaan Purwokerto yaitu aplikasi Salinmas (Sampah Online Banyumas). Sehingga dapat dikatakan bahwa Salinmas merupakan hasil produk dari kebijakan Bupati Banyumas terkait pengelolaan sampah sesuai Perbup tersebut.

Merujuk pada Perbup Banyumas di atas, pengelolaan aplikasi Salinmas dilakukan sesuai dengan penetapan peraturan yang berupa penetapan pertanggungjawaban penanganan sampah rumah tangga oleh Pemerintah Desa dengan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat yang

berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengelolaan Sampah Daerah Banyumas, menetapkan lokasi TPS3R, melakukan sosialisasi penanganan sampah melalui teknologi informasi dan memberikan manfaat ekonomi yang keuntungannya diberikan kepada Kas Desa dan operasional KSM.

Implementasi Salinmas juga semakin diperkuat oleh adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2024 yang telah di revisi pada Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2020, Kabupaten Banyumas memiliki *planning* yang bertujuan untuk menjamin terakomodasinya sasaran Pembangunan dalam dokumen Pembangunan Smart City, strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal Pemeliharaan lingkungan yakni melakukan rencana aksi berupa pengembangan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri yang bersifat aman, ramah, dan berkelanjutan. Hal ini juga berkaitan dengan aspek Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep Pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dengan wajar sesuai dengan batasannya untuk menekankan pada perbaikan seperti pelestarian sumber daya alam.

Pembuatan aplikasi Salinmas (Sampah Online Banyumas) pemerintah berharap permasalahan sampah organik di wilayah perkotaan khususnya Kota Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas bisa teratasi. Aplikasi Salinmas masih dikhususkan untuk wilayah perkotaan tentunya memiliki alasan yaitu karena wilayah perkotaan tidak memiliki TPA layaknya di desa.

Aplikasi Salinmas ini merupakan aplikasi yang diciptakan untuk memajemen sampah organik. Aplikasi Salinmas merupakan aplikasi pengelolaan sampah organik berbasis online yang memiliki sistem layanan seperti belanja online, yang mana masyarakat menjual sampah yang telah mereka pilah dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pengelola layanan membeli dan melakukan penjemputan sampah tersebut. Jika terdapat Salinmas hanya dikhususkan untuk pengelolaan sampah organik saja, maka untuk sampah an-organik dikelola oleh aplikasi lain yaitu Jeknyong (Ojeke Nyong). Jeknyong memiliki sistem pelayanan yang sama seperti Salinmas, namun Jeknyong ini dioperasikan oleh pihak swasta yakni PT. Banyumas Investama Jaya yang bekerjasama dengan Pemkab Banyumas, tetapi untuk pengembangan aplikasi dikembangkan oleh Dinkominfo Kabupaten Banyumas.

Keberjalanan aplikasi Salinmas ini tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor dari masyarakatnya saja, namun juga bagaimana dari pemerintah sebagai pemilik layanan *e-service*. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang tak kalah penting dari pengetahuan dan partisipasi warga dalam penggunaan *gadget* pada aplikasi Salinmas. Salah satu faktor dari pemerintah ialah bagaimana pemerintah mampu mengelola inovasi aplikasi Salinmas agar pengelolaan sampah menjadi lebih efisien. Kemudian untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah khususnya melalui Salinmas, pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan sosialisasi terkait digitalisasi teknologi informasi dan pentingnya partisipasi masyarakat kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga harus terus melakukan evaluasi aplikasi Salinmas agar permasalahan sampah dapat teratasi dan mencapai efisiensi yang diharapkan.

Namun, selain peran pemerintah keberhasilan dari aplikasi ini juga diperlukan adanya kemampuan dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat terkait penggunaan gadget dalam mengakses aplikasi Salinmas, karena dengan masyarakat yang sudah mampu menggunakan aplikasi dengan baik maka tujuan dari implementasi tersebut dapat tercapai. Implementasi aplikasi Salinmas yang dikhususkan untuk wilayah perkotaan telah dapat diimplementasikan di seluruh kelurahan di Purwokerto yakni di 27 kelurahan, salah satunya yaitu Kelurahan Grendeng. Grendeng dijadikan wilayah pelaksanaan aplikasi Salinmas karena merupakan wilayah yang memiliki populasi padat penduduk sehingga sampah yang dihasilkan juga tidak sedikit dan berpotensi menimbulkan penumpukan sampah. Kemudian Kelurahan Grendeng merupakan kelurahan yang berada di lingkup universitas yakni Universitas Jenderal Soedirman, yang mana penduduk akan bertambah setiap tahunnya mengikuti jumlah kuota mahasiswa yang ditetapkan oleh universitas. Bahkan pada tahun 2020, jumlah mahasiswa Unsoed mencapai 23.071 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Banyaknya pendatang yang menetap inilah yang menyebabkan volume sampah di Kelurahan Grendeng menjadi terus meningkat secara konsisten.

Keterbatasan masyarakat dalam menggunakan *gadget* dan konsistensi masyarakat menjadi salah satu masalah dalam penanganan sampah sebetulnya

telah dilakukan yaitu dengan dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat dan KSM. Namun, dari masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi, banyak dari mereka yang kurang paham terkait penggunaan aplikasi. Kemudian bagi mereka yang dapat memahami penggunaan aplikasi ternyata tidak konsisten dalam melakukan pembuangan sampah. Masyarakat lebih memilih pembuangan sampah secara konservatif dengan membuang di tong sampah tanpa memilah sampah sebelum melakukan pembuangan atau mereka lebih memilih untuk membakar sampah yang mereka hasilkan. Maka dari itu, peneliti memiliki keinginan untuk meneliti bagaimana implementasi aplikasi Salinmas sebagai upaya untuk mengatasi masalah sampah secara berkelanjutan sesuai dengan aspek-aspek berkelanjutan dan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana faktor pendorong dan penghambat instansi dalam implementasi aplikasi Salinmas di Kelurahan Grendeng.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberlanjutan implementasi aplikasi Salinmas sebagai upaya untuk menangani masalah sampah organik di Kelurahan Grendeng?
2. Apa saja faktor ketidakberjalan implementasi aplikasi Salinmas sebagai upaya untuk menangani masalah sampah organik di Kelurahan Grendeng?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan keberlanjutan implementasi aplikasi Salinmas sebagai upaya untuk menangani masalah sampah organik di Kelurahan Grendeng.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penyebab ketidakberjalan implementasi aplikasi Salinmas sebagai upaya untuk menangani masalah sampah organik di Kelurahan Grendeng

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan terkait upaya penanganan sampah melalui teknologi informasi, dengan mendeskripsikan upaya penanganan sampah organik melalui teknologi informasi di Kelurahan Grendeng, Kabupaten Banyumas.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran, dan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam upaya menangani permasalahan sampah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam

mengimplementasikan kebijakan penanganan sampah melalui teknologi informasi. Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, mengedukasi, dan mengimplementasikan pengetahuan mengenai upaya penanganan masalah sampah dengan memanfaatkan teknologi informasi bagi penulis. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk kedepannya dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori khususnya dalam implementasi kebijakan penanganan masalah sampah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Berkembangnya teknologi di era revolusi industry 4.0 memberikan banyak peluang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pada pelayanan terhadap masyarakat salah satunya adalah pengelolaan sampah yang berbasis *e-service*. Permasalahan sampah telah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena memberikan efek atau dampak yang negatif bagi lingkungan dan tentunya akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan inovasi aplikasi guna mengatasi masalah sampah melalui pengelolaan berbasis online. Penelitian terkait pengelolaan sampah telah banyak dilakukan salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Priatna, dkk 2019) yang meneliti terkait pengelolaan sampah di TPA Gunung Tugel dimana dalam penelitian ini penulis mengungkap bahwa salah satu faktor yang menyebabkan TPA Gunung Tugel mengalami kekurangan lahan yaitu karena sampah yang dibuang ke TPA tidak mengalami pemilahan terlebih dahulu. Kemudian metode pengelolaan sampah

yang digunakan TPA Gunung Tugel yaitu menggunakan cara atau metode *open dumping* dan *control landfill*. Sistem *open dumping* sendiri merupakan metode pembuangan sampah yang dibiarkan begitu saja tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, sedangkan *control landfill* merupakan metode pengelolaan kombinasi dari sistem *open dumping* dan *sistem sanitary landfill*. Tetapi hasil dari penelitian menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas mulai meninggalkan metode tersebut karena menyebabkan pencemaran lingkungan dan banyak dari warga sekitar yang mengeluh bau tidak sedap serta mengalami batuk-batuk. Penelitian lain terkait pengelolaan sampah dilakukan oleh (Aji R. M., 2020) memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu meneliti inovasi dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi yaitu aplikasi Salinmas (Sampah Online Banyumas) di wilayah perkotaan khususnya wilayah Kelurahan Sokanegara dan Kelurahan Kedungwuluh. Hasil dari penelitian yang dilakukan, pengetahuan masyarakat di kedua wilayah tersebut dikatakan tinggi karena masyarakat cepat tanggap dan cepat mengerti bagaimana penggunaan aplikasi Salinmas ketika dilakukan sosialisasi oleh pemerintah.

Selanjutnya penelitian dari (Dian Apriliani, 2021) yaitu meneliti tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang menggunakan teknologi informasi yaitu melalui program Silampah (Sistem Lapor Sampah). Namun pada penelitian ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas dari program Silampah itu sendiri. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Silampah masih belum optimal

karena melihat fakta lapangan masyarakat masih belum siap menggunakan aplikasi Silampah dan masih terdapat kendala dalam implementasinya. Kemudian penelitian dari (Hartono, 2020) , meneliti tentang inovasi bank sampah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Bank sampah yang diimplementasikan di Kabupaten Bekasi merupakan pengelolaan sampah yang memiliki konsep kerja seperti bank yang mana masyarakat menabung sampah dan masyarakatpun memiliki nomor rekening tabungan sampah. Namun dalam implementasi bank sampah ini masih belum sepenuhnya terlaksana karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah masih sangat minim.

Penelitian lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga oleh (Aji R. W., 2019) pada studi kasus Kabupaten Cilacap bahwa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini memiliki kekuatan yaitu mengurangi jumlah sampah plastik di sekitar, industry rumah tangga bisa menghasilkan kerajinan tangan dari sampah plastic sehingga menambah peluang penghasilan rumah tangga, dan adanya dukungan dari pemerintah setempat sehingga program pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam pengelolaan sampah rumah tangga tentunya memiliki kelemahan yaitu dalam sistem daur ulang sampah belum terdapat rancangan usaha untuk mempertimbangkan aspek keindustrian, banyak masyarakat yang masih memiliki perspektif bahwa daur ulang sampah plastic masih dianggap sebagai kerja sampingan, industri kerajinan tangan masih belum dikatakan baik dilatar belakangi faktor keterampilan masyarakat yang masih rendah, serta pemasaran produk daur ulang belum mamiliki koneksi yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah sebetulnya bisa dilakukan dengan

mengolah sampah menjadi peluang yang dapat memberikan dampak positif dan keuntungan bagi masyarakat.

Kemudian penelitian oleh (Nofriansyah, dkk 2022) meneliti tentang penggunaan platform digital dalam pengelolaan sampah. Konsep dari aplikasi yang akan digunakan ini adalah masyarakat menampung sampah terlebih dahulu seperti kemudian tim pengelola akan memilih sampah yang akan dibeli untuk dikelola. Setelah dilakukan pembelian sampah oleh tim pengelola, proses selanjutnya adalah konfirmasi pembelian untuk dilakukan proses penjemputan sampah. Penelitian lain yang masih berkaitan dengan pengelolaan sampah oleh (Ramadhani, 2021) yaitu Inovasi Platform Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Ecopreneur. Pada inovasi pengelolaan sampah ini berbasis internet melalui website Portablin yang berisi tentang pengelolaan sampah dari pengenalan hingga penjualan sampah. Pada inovasi ini metode pengelolaan sampah yang digunakan adalah konsep Blanded Learning yang mana menggabungkan pengajaran melalui sistem tatap muka dan online. Online learning ini dilakukan dengan sosialisasi tahap dua dan pendampingan platform Portalbin melalui Whatsapp Group dengan didampingi oleh mitra.

Selain itu, penelitian oleh (Kery Utami, 2022) terkait keberjalanan perencanaan aplikasi bank sampah digital pada bank sampah solusi hijau perlu adanya adaptasi teknologi untuk mencatat administrasi penabungan sampah. Adanya perencanaan aplikasi bank sampah menjadi salah satu alternatif menabung bagi Masyarakat dengan cara memilah sampah menjadi sumber daya ekonomi. Keberlanjutan perencanaan aplikasi bank sampah penulis pada penelitian ini menyarankan untuk

membuat desain dan membangun prototipe aplikasi yang kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai wujud dari implementasi aplikasi solutif dalam pemecahan masalah sampah.

Melihat dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada topik yang diangkat yaitu terkait pengelolaan sampah melalui digitalisasi. Meskipun sama-sama meneliti tentang pengelolaan sampah melalui teknologi informasi, namun penelitian pada ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini membahas bagaimana implementasi dari aplikasi itu sendiri dalam hal pengelolaan sampah. Sedangkan pada penelitian terdahulu lebih membahas tentang efektivitas dari implementasi pengelolaan sampahnya, pengelolaan di TPA, dan pengelolaan sampah untuk mendatangkan peluang di bidang industry. Perbedaan lain dari penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat tentang bagaimana faktor yang menghambat dan faktor yang mendorong dari pengelolaan sampah berbasis digital. Sedangkan penelitian terdahulu tidak menjelaskan bagaimana faktor pendorong dan penghambatnya selain itu juga perbedaan juga terletak pada subjek dan objek dalam penelitian.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1.1.1 Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut (Horn, 1975) dalam (Yuliah, 2020: 138) implementasi kebijakan publik yang dinyatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh keputusan sebelumnya. Tindakan itulah yang digunakan sebagai upaya perubahan dalam suatu

keputusan menjadi tindakan yang lebih baik dari sebelumnya yang dilakukan dalam lini masa tertentu guna mencapai perubahan baik perubahan kecil maupun perubahan besar yang ditetapkan oleh Lembaga atau organisasi publik yang memiliki keinginan untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pengertian lain implementasi kebijakan publik juga didefinisikan oleh (Mufiz, 1999) implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengimplementasikan atau melakukan kebijakan serta rangkaian suatu kegiatan yang diterapkan atau dijalankan setelah suatu kebijakan itu dirumuskan. Kemudian implementasi kebijakan baiknya harus menghasilkan suatu perubahan yang bersifat efektif dan efisien.

Menurut George C. Edwards III (1980) dalam (Yuliah, 2020: 139) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut.

1. Komunikasi, implementasi dapat terwujud jika tujuan atau ukuran dari kebijakan itu sendiri dapat terpenuhi, diterima, dan dimengerti oleh individu-individu yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap berhasilnya suatu tujuan dari hasil dari kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, kebijakan juga memiliki tujuan yang mana harus dikomunikasikan dengan baik oleh para aktor dalam kebijakan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah komunikasi terkait konsistennya pelaksana kebijakan agar dalam mengimplementasikan kebijakan dapat berjalan dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut.

2. Sumberdaya, sumber daya berkaitan dengan keahlian aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Jika aktor yang terlibat memiliki tanggung jawab atas program yang sedang dijalankan maka sumber daya tidak lagi menjadi masalah terkait implementasi program. Komponen dari sumber daya itu sendiri yaitu meliputi keahlian, informasi yang relevan, dan jumlah staf yang mumpuni untuk dapat mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Disposisi atau Sikap, sikap dari aktor yang mengimplementasikan program menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana implementasi program dapat memberikan efektivitas. Sebelum dapat mengimplementasikan, baiknya telah menyetujui isi kebijakan terlebih dahulu agar dalam proses implementasinya akan menjalankan dengan senang hati. Terdapat tiga bentuk respon implementator dengan kebijakan yakni, kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana, dan intensitas respon.
4. Struktur Birokrasi, yaitu tentang implementator dari suatu kebijakan yang mana tidak dapat lepas dari bentuk birokrasi. Struktur atau bentuk birokrasi sendiri yakni sebuah ciri, bentuk, dan aturan keterkaitan baik secara potensial ataupun nyata dengan apa yang dimiliki ketika menjalankan kebijakan.

Setelah melihat beberapa teori dari ahli terkait implementasi kebijakan publik, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah kegiatan melaksanakan suatu rancangan yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui implementasi kebijakan, maka suatu usulan program dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini akan menggunakan teori



dari George C. Edwards III (1908) karena untuk mengetahui keberlanjutan implementasi aplikasi Salinmas di Kabupaten Banyumas maka perlu mengetahui faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan publik seperti pada teori tersebut.

### ***1.1.2 New Public Service***

Menurut Denhardt dan Denhardt (2003) dalam Nurdin (2019: 4-5), New Public Service merupakan suatu teori atau paradigma pelayanan publik yang memiliki dasar teoritis demokratis, yang mana pemerintah mengutamakan kepentingan publik terlebih dahulu dan pemerintah juga melayani masyarakat sebagai masyarakat bukan pelanggan. New Public Service memiliki akar dari berbagai ide terkait demokrasi yang mana dikemukakan oleh Dimock, Dahl dan Waldo dalam (Nurdin, 2019: 4) yang meliputi: 1) Teori *democratic citizenship*, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk menciptakan solidaritas dan membangun komitmen untuk menghindari adanya suatu konflik; 2) Model komunitas dan *civil society*, berkaitan dengan peran dari masyarakat sipil untuk membangun *social trust*, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tatanan pemerintah yang bersifat demokratis; 3) Teori organisasi *humanism*, yang berkaitan dengan fokus dari administrasi negara untuk menghargai nilai kemanusiaan dan respon terhadap nilai kemanusiaan; 4) Teori *postmodern*, yang berkaitan dengan teori untuk memecahkan masalah dengan menutamakan dialog. Adapun prinsip New Public Service menurut Denhardt dan Denhardt (2003) yaitu sebagai berikut.

1. Melayani Warga Negara, bukan customer

Dalam konsep *New Public Service*, pemerintah memandang publik sebagai citizen atau warga negara yang mana mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama atau tidak adanya perbedaan menurut pandangan tertentu. Pada konsep NPS, masyarakat juga bukan sebagai customer atau pelanggan yang mana dilihat dari kemampuan membeli atau membayar layanan. Dalam NPS tidak hanya masyarakat yang harus memenuhi kewajibannya saja, namun abdi negara juga harus bersifat responsive terhadap masyarakat untuk membangun trust atau kepercayaan sebagai kewajiban dari abdi negara.

2. Mengutamakan Kepentingan Publik

*New Public Service* memiliki pandangan bahwa aparatur negara bukanlah aktor utama dalam merumuskan suatu kepentingan publik. Administrator publik merupakan aktor yang sangat penting dalam sistem pemerintahan yang luas, yang mana terdiri atas warga negara, kelompok, wakil rakyat, dan lembaga lainnya. Kemudian administrator negara memiliki peran yakni membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingan publik. Administrator publik memiliki kewajiban dalam memfasilitasi forum dialog publik karena pendapat publik berpengaruh terhadap peran dan tanggungjawab administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan ekonomis namun juga berorientasi pada nilai yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Kewarganegaraan lebih berharga daripada Kewirausahaan

New Public Service memandang bahwa keterlibatan warga negara atau citizen dalam proses administrasi dan pemerintahan lebih penting daripada pemerintahan yang digerakkan oleh pihak lain atau swasta. Menurut konsep NPS, pemerintah akan lebih baik jika digerakkan oleh pemerintah itu sendiri dengan melibatkan warga negara di dalamnya. Prinsip ini berimplikasi pada peran pemerintah yang mana di masa lalu pemerintah lebih bersifat mengarahkan masyarakat berupa pengendalian. Namun seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat yang bersifat modern mengharuskan pemerintah mengganti fungsi controlling menjadi agenda setting fasilitasi, negosiasi untuk memecahkan masalah publik.

#### 4. Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis

Pada prinsip ini berkaitan dengan cara administrasi publik mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi kebijakan publik. Kemudian pada konsep NPS, fungsi utama dari NPS adalah keterlibatan citizen atau masyarakat dan Pembangunan komunitas. Keterlibatan masyarakat pada konsep NPS menjadi suatu hal yang harus dijalankan dalam implementasi kebijakan pada sistem demokrasi, yang mana meliputi tahap perumusan dan proses kebijakan. Adanya organisasi juga menjadi ruang publik bagi citizen dan administrator dengan perspektif yang berbeda untuk bertindak bersama demi kepentingan publik yang lebih.

#### 5. Tahu kalau Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana

Dalam prinsip ini, aparatur publik tidak hanya memprioritaskan kepentingan pasar saja, namun mereka juga harus memprioritaskan ketaatan

mereka terhadap hukum, konstitusi, nilai politik, nilai masyarakat, standard professional, dan kepentingan citizen. Kemudian menurut New Public Service, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan customer merupakan suatu hal yang sangat penting tetapi aparatur publik juga harus memperhatikan tanggungjawab mereka dalam sisi etika, prinsip demokrasi, dan kepentingan publik.

#### 6. Melayani Ketimbang Mengarahkan

Dalam New Public Service, kepemimpinan terfokus pada kepemimpinan yang dilandaskan pada nilai moral atau transformasional *leadership*. Kemudian kepemimpinan dalam NPS juga merupakan shared leadership yang mana kendali atas kepemimpinan tidak hanya terpusat di lapisan paling atas, tetapi melibatkan banyak kelompok sehingga kedudukannya bukan sebagai pemilik tetapi pelayan publik.

#### 7. Menghargai Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas

Pada prinsip ini, *New Public Service* melihat bahwa manusia didorong oleh faktor faktor martabat manusia (*human dignity*), rasa memiliki dan dimiliki (*belongingness*), perhatian pada orang lain, pelayanan, dan kepentingan publik. sehingga parameter kinerja pegawai tidak hanya berdasarkan ekonomi saja namun juga harus memperhatikan nilai kejujuran, responsivitas, kesetaraan, pemberdayaan, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya.

Penelitian ini juga menggunakan teori New Public Service oleh Denhardt dan Denhardt yakni tujuh prinsip New Public Service, yang mana Salinmas (Sampah

Online Banyumas) merupakan salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah yang menjadikan masyarakat sebagai masyarakat bukan pelanggan, yang mana ditandai dengan adanya kesetaraan hak dan kewajiban dalam melayani bukan layaknya konsumen yang perlu diprioritaskan sesuai dengan besaran jumlah yang dibayarkan untuk layanan pemerintah. Kemudian Salinmas juga merupakan layanan publik yang dijalankan oleh pemerintah dengan melibatkan kolaborasi antara masyarakat dan KSM, serta pihak swasta.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

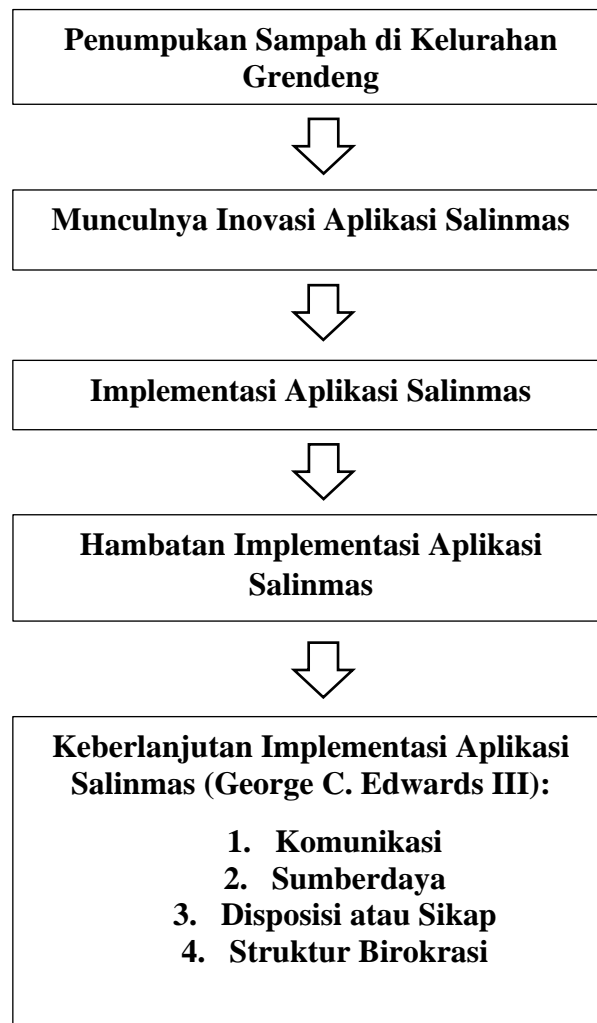
Dalam penelitian ini, untuk menganalisis keberlanjutan implementasi aplikasi Salinmas akan menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III (1980) sebagai berikut.

1. Komunikasi, komunikasi berkaitan dengan tujuan adanya inovasi aplikasi Salinmas yang harus di sampaikan dengan baik oleh para aktor yang terlibat. Selain itu, komunikasi juga berkaitan dengan konsistennya instansi dalam melakukan sosialisasi terkait inovasi aplikasi yang telah dibuat.
2. Sumberdaya, berkaitan dengan SDM pengelola maupun pengguna dalam menerima inovasi yang ada. Selain itu sumberdaya juga berkaitan dengan ketersediaan anggaran pada instansi untuk mengimplementasikan inovasi Salinmas secara berkelanjutan.
3. Disposisi atau sikap, berkaitan dengan sikap aktor atau instansi untuk mempengaruhi Masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan.

Kemudian sikap juga berkaitan dengan penerimaan atau respon Masyarakat terhadap implementasi aplikasi Salinmas.

4. Struktur Birokrasi, berkaitan dengan ciri, bentuk, dan aturan keterkaitan baik secara potensial maupun nyata saat instansi mengimplementasikan kebijakan.

### 1.8 Kerangka Pemikiran



## **1.9 Argumen Penelitian**

Berkembangnya teknologi informasi menjadi serba modern mengakibatkan semua aspek mengalami perubahan tak terkecuali dalam upaya penanganan masalah sampah. Agar pelayanan publik menjadi lebih bersifat efektif dan efisien, maka pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Dinas Lingkungan Hidup menciptakan aplikasi layanan pengelolaan sampah berbasis digital yakni Salinmas yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah organik di wilayah perkotaan. Implementasi aplikasi Salinmas sebagai aplikasi pengelolaan sampah organik dapat berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan yang diharapkan jika masyarakat melakukan pengelolaan dengan konsisten melalui aplikasi tersebut. Kemudian keberhasilan implementasi program pengelolaan sampah juga dapat dicapai jika pemerintah mendukung penuh atas keberjalanan program tersebut.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.1.3 Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2007), metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian namun tidak digunakan untuk memberikan kesimpulan yang luas. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif tidak mengumpulkan data dalam bentuk angka, melainkan data yang bersumber dari catatan lapangan, naskah wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain. Kemudian

bentuk hasil dari penelitian kualitatif deskriptif hanya berupa kalimat, gambar ataupun dokumentasi dari subjek penelitian. Sehingga penelitian ini berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan secara jelas dan nyata suatu gejala sosial yang ada serta mengungkapkan implementasi aplikasi Salinmas melalui teknologi informasi dalam penanganan masalah sampah di Kelurahan Grendeng, Kabupaten Banyumas secara deksriptif.

#### **1.1.4 Lokasi Penelitian**

Penelitian yang difokuskan pada keberlanjutan implementasi aplikasi Salinmas ini berlokasi di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.1.5 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai Dinas yang menciptakan inovasi aplikasi Salinmas, KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pengelola layanan membeli dan melakukan penjemputan sampah. Kemudian masyarakat Kelurahan Grendeng dengan kelompok pembanding terdidik dan tidak terdidik yang ikut berpartisipasi dalam implementasi aplikasi Salinmas. Serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya & Lingkungan Hidup sebagai NGO atau pihak netral.

No.	Informan	Instansi
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2.	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah	Pengelola Sampah
3.	Kepala Kelurahan Grendeng	Pemerintah Kelurahan Grendeng



4.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya & Lingkungan Hidup	Non-Governmental Organization
5.	Masyarakat Grendeng	User atau pengguna (2 orang)

### 1.1.6 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis dan sumber data yaitu sebagai berikut.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari informan atau narasumber ketika turun lapangan. Menurut (Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran, 2013), data primer merupakan data yang dihasilkan pertama kali oleh narasumber atau informan. Kemudian pengertian data primer yang berupa kalimat yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung ketika turun lapangan melainkan data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal, dokumentasi, dan data statistic. Data sekunder menurut (Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran, 2013) data sekunder

merupakan sumber data kedua yang diperoleh dari lapangan atau dari Lembaga yang relevan dengan penelitian.

### **1.1.7 Teknik Pengumpulan data**

Menurut (Sugiyono: 2013), teknik pengumpulan data menjadi Langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian karena penelitian memiliki tujuan untuk memperoleh data sehingga ketika melakukan penelitian tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data valid yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Terdapat tiga Teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut..

1. Observasi. Menurut Agustinova (2015: 36), observasi adalah pengamatan pada suatu objek yang diteliti baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan indera untuk memperoleh data agar dapat disimpulkan dalam penelitian. Menurut Moleong (1990: 125-126), teknik observasi ini memiliki peran yang pasif di mana memungkinkan peneliti mengamati dan mencatat perilaku dan peristiwa yang ada agar dapat melakukan validasi bias.
2. Wawancara. Wawancara menurut Agustinova (2015: 33) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab untuk mendapatkan makna yang dituju dalam suatu topik tertentu. Proses wawancara yang dilakukan adalah dengan memberikan pertanyaan yang bersifat struktur kepada informan atau narasumber terkait dengan implementasi aplikasi Salinmas di Kelurahan Grendeng, Kabupaten Banyumas.

3. Studi Dokumentasi. Menurut Agustinoa (2015: 39) studi dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data menggunakan berbagai buku, dokumen, dan tulisan yang bersifat relevan yang digunakan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkapkan objek penelitian. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang didapatkan dari dokumentasi, laporan kegiatan, dan arsip implementasi penanganan sampah untuk melengkapi data yang belum lengkap dari hasil wawancara dan observasi.

#### **1.1.8 Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif memiliki beberapa Langkah untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan Teknik analisis data menurut (Miles, 1994) yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi data. Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian dilakukan pemisahan data yang paling merujuk pada topik penelitian, menentukan tema, mengklasifikasikan, dan merangkum agar dapat mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang nyata terkait masalah yang sedang diteliti.
2. Penyajian data. Dalam penyajian data, analisis yang disajikan yaitu berbentuk narasi yang mendeskripsikan hasil data yang ditemukan menggunakan uraian kalimat.
3. Penarikan kesimpulan. Dalam tahapan ini, meskipun penarikan kesimpulan telah dilakukan di tahap reduksi data namun kesimpulan yang dihasilkan belum bersifat tetap dan akurat. Kemudian di tahap

inihlah kesimpulan yang dihasilkan sudah bersifat tetap dan akurat dengan dibuktikan oleh data-data lapangan yang factual.

#### **1.1.9 Kualitas Data**

Pada penelitian kualitatif, hasil penelitian yang didapatkan yakni data berupa fakta yang benar-benar nyata di lapangan. Kemudian data hasil penelitian perlu dilakukan uji validitas agar data yang dihasilkan tidak terjadi kesalahan atau invalid. Dalam melakukan uji validitas, penulis menggunakan Teknis triangulasi untuk melakukan pengecekan data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, dengan cara membandingkan hasil wawancara, membandingkan wawancara dengan dokumen yang bersifat relevan, dan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi atau pengamatan.